

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah penerapan metode *e-billing*. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya.

3.1.1 Sejarah Berdirinya Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Maka rangkaian sejarah ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya tahun 1976 sampai dengan 1981 tonggak sejarah lahirnya Kota Tasikmalaya dimulai dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan Prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD lama Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota Administratif Pertama yaitu Drs. H. Oman Roosman oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah Kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa

sebanyak 13 desa. Berkat perjuangan unsur Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin Bupati saat itu H. Suljana W.H. beserta tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dirintislah pembentukan Kota Tasikmalaya dengan lahirnya tim sukses pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yang Ds. Panawinata SH bersama tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001, Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak lepas dari peran serta semua pihak maupun berbagai *stakeholder* di daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Tentunya dengan pembentukan Kota Tasikmalaya harus ditindaklanjuti dengan menyediakan berbagai prasarana dan sarana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berbagai langkah untuk mempersiapkan prasarana, sarana maupun personil serta komponen-komponen lainnya guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagai tuntutan dari pembentukan daerah otonom itu sendiri.

Pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai PJ Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 bahwa Wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 15 dan desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Tawang.
2. Kecamatan Cihideung.
3. Kecamatan Cipedes.
4. Kecamatan Indihiang.
5. Kecamatan Kawalu.
6. Kecamatan Cibeureum.
7. Kecamatan Mangkubumi.
8. Kecamatan Tamansari.
9. Kecamatan Purbaratu (baru).
10. Kecamatan Bungursari (baru).

Sebagai salah satu syarat Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD). Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disyahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 Tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya yang pertama kali.

Pada tanggal 14 November 2002 dilantiknya Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota Tasikmalaya, pelantikan Walikota tersebut adalah sebagai puncak momentum dari pemilihan kepala daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

3.1.2 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

1. Visi

Berlandaskan iman dan taqwa, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berdaya saing menuju masyarakat madani.

2. Misi

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kasalehan sosial masyarakat.
- b. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya lokal.

Visi dan Misi Kota Tasikmalaya tersebut termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

3.1.3 Sejarah Singkat KPP Pratama Tasikmalaya

Pada tanggal 15 Mei 1967 berdirilah Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya dikarenakan wilayah Kantor Inspeksi Keuangan Bandung tidak mungkin lagi dapat menjangkau wilayah luas dengan potensi fiskal yang tinggi. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau kebijaksanaan untuk memisahkan Kantor Dinas Pajak Bandung menjadi Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya dan Kantor Inspeksi Pajak Karawang.

Sekitar tahun 1967 Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya berkedudukan di jalan Manonjaya (sekarang jalan Sutisna Senjaya) mulai dibangun. Pada tahun 1970 berdirilah sebuah gedung Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya berlantai dua yang cukup luas. Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya membawahi:

1. Kantor Dinas Luar Tingkat II Tasikmalaya di Tasikmalaya.
2. Kantor Dinas Luar Tingkat II Garut di Garut.
3. Kantor Dinas Luar Tingkat II Ciamis di Ciamis.
4. Kantor Dinas Luar Tingkat II Banjar di Banjar.

Tahun 1982, mulai dibangun Kantor Dinas Luar Tingkat II Tasikmalaya yang berada di Jalan Pancasila No. 29 Tasikmalaya berikut rumah dinas yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat, Bapak Drs. Lichoen Tedjoswojo, rumah dinas yang berada di Jalan A.Yani Tasikmalaya dan Kantor Dinas Luar Tingkat II Banjar berikut rumah dinasnya,

perluasan atau penambahan gedung Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya, saat itu masa kepemimpinan Bapak Drs. Noer Barasota, SP sebagai Kepala Kantor dan Bapak Alwi Asti, SH sebagai Kepala Seksi Umum.

Nama Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya secara resmi digunakan sejak tahun 1989 sebagai reorganisasi dari Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1989. Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya ini telah berdiri sejak tahun 1966, diantaranya ditandai dengan adanya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 26 juli Nomor Pgw. 7-8-50, dengan Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang pertama adalah Bapak Drs. M Kanani (almarhum). Perubahan ini dilakukan seiring dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*.

Pada tanggal 28 Agustus 2007 seiring adanya modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya mengalami perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya dan terjadi juga perubahan struktur organisasi yang sangat mendasar yaitu struktur organisasi Kanwil berserta KPP diubah sedemikian rupa sehingga mencerminkan *prototype* institusi masa depan yang menyelenggarakan administrasi perpajakan secara modern dengan menekankan pada fungsi pelayanan dan pengawasan secara profesional sebagai perwujudan *customer satisfaction* dan *corporate governance*. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Kep-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai

beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.

Perubahan organisasi dengan sistem administrasi modern adalah menyatukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karipka).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tasikmalaya dipecah berdasarkan wilayah kerja menjadi 3 kantor yaitu, KPP Pratama Tasikmalaya dengan wilayah kerja Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, KPP Pratama Garut dengan wilayah kerja Kabupaten Garut dan KPP Pratama Ciamis dengan wilayah kerja Kabupaten Ciamis dan Banjar.

3.1.4 Gambaran Umum KPP Pratama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada akhir tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. KPP Wajib Pajak Besar
2. KPP Madya
3. KPP Pratama

Beberapa karakteristik untuk setiap jenis KPP diantaranya dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Karakteristik KPP

No	Uraian	KPP WP Besar	KPP Madya	KPP Pratama
1.	Skala Wajib Pajak	BUMN & WP Besar Nasional	WP Besar Kanwil (Regional)	WP Menengah Kecil (SME)
2.	Jenis Wajib Pajak	Badan (<i>Corporate</i>)	Badan (<i>Corporate</i>)	Badan & OP
3.	Jumlah Wajib Pajak	300-400	200-500	Ribuan
4.	Jenis Pajak	PPH, PPN, PTLL	PPH, PPN & PTLL	PPH, PPN & PTLL, PBB & BPHTB
5.	PPN	Sentralisasi	Sentralisasi	Desentralisasi
6.	P2PPH	Desentralisasi	Desentralisasi	Desentralisasi
7.	Penugasan AR	Sektor Industri	Sektor Industri	Wilayah
8.	Fungsi Ekstensifikasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
9.	Jumlah Eselon IV	9 (Sembilan)	9 (Sembilan)	10 (Sepuluh)
10.	Wilayah Kerja	Nasional	Regional	Lokal

3.1.5 Profil KPP Pratama Tasikmalaya

1. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang unggul dalam layanan dan kinerja guna memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan negara dan sektor pajak.

2. Misi

Menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern dengan menerapkan nilai-nilai kementerian keuangan dan memberikan edukasi serta

asistensi secara berkesinambungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

3. Alamat

KPP Pratama Tasikmalaya beralamat di Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Cikalang, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat.

4. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Tasikmalaya meliputi:

- Kota Tasikmalaya (10 Kecamatan, 69 Kelurahan) dengan luas wilayah 171,56 km² dan jumlah penduduk 635.464 orang.
- Kabupaten Tasikmalaya (39 Kecamatan, 352 Desa) dengan luas wilayah 2.715,52 km² dan jumlah penduduk 1.675.675 orang.

Batas-batas wilayah kerja KPP Pratama Tasikmalaya meliputi:

- Sebelah Utara : Kab. Majalengka.
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat : Kab. Garut, Peg. Galunggung.
- Sebelah Timur : Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran.

3.1.6 Karakteristik KPP Pratama

Sebagaimana lazimnya KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama juga memiliki karakteristik-karakteristik seperti dibawah ini :

1. Organisasi berdasarkan fungsi

- a. Penggabungan KPP, KPPBB dan Karipka

b. Struktur Organisasi

Secara umum tugas Kepala Kantor dan masing-masing Kepala Seksi adalah sebagai berikut:

➤ Kepala Kantor

Mengingat KPP pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB, dan Karipka maka Kepala Kantor Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ Kepala Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, serta perlengkapan.

➤ Kepala Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

➤ Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filling* dan penyiapan laporan kinerja.

➤ Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP pratama terdapat 4 (empat) kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial) tertentu.

➤ Kepala Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasi pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ Kepala Seksi Penerimaan

Membantu tugas Kepala Kantor menngkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

➤ Kepala Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

➤ Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas pejabat fungsional pemeriksaan dan pejabat fungsional penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

c. *Account Representative*

Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan *account representative* (staf pendukung pelayanan) yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan kepala seksi pengawasan dan konsultasi. Ikhtisar tugas *account representative* adalah sebagai berikut :

➤ Pengawasan kepatuhan.

➤ Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.

- Penyusunan profil Wajib Pajak.
- Analisis kinerja Wajib Pajak.
- Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi.

2. Sistem Informasi yang Terintegrasi

- a. Penggunaan *workflow* dan *case management system*.
- b. Jaringan komputer yang terintegrasi.
- c. Sistem informasi yang terintegrasi untuk seluruh jenis pajak.

3. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

- a. Peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan.
- b. Alokasi penyebaran pegawai.
- c. Penerapan kode etik pegawai.
- d. Pemberian tunjangan kegiatan tambahan.

4. Sarana Kantor yang Memadai

- a. Perbaikan sarana dan prasarana TPT.
- b. Perubahan *lay out* (tata ruang kerja) yang terbuka dan sesuai ftmgsi.
- c. Kenyamanan ruang kerja pegawai.

5. Tata kerja yang transparan

- a. Pusat pelayanan (*Call Center*).
- b. Pusat pengaduan (*Complain center*).
- c. *Website*.
- d. Survei kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

3.1.7 Pola Pengelolaan KPP Pratama

Pengelolaan KPP Pratama yang selalu harus berorientasi pada pelayanan prima merupakan ciri utama yang harus ditonjolkan demi tercapainya kinerja yang terbaik. Sebagai konsekuensi agar hal tersebut bisa berjalan, maka perlu didukung dengan perilaku yang profesional dan akuntabel dari komponen-komponenya yaitu organisasi DJP dan masyarakat (Wajib Pajak). Bagi KPP Pratama orientasi *effort* jauh lebih utama dibandingkan dengan *result*. Untuk itu perlu adanya pendekatan-pendekatan sebagai *guideline* dalam menentukan dan melaksanakan strategi organisasi. KPP Pratama dengan niat tulus harus senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi dari Wajib Pajak yang dalam hal ini harus dipandang sebagai “mitra” yaitu :

1. Penguasaan wilayah.
2. *Proactive Conselling*.
3. Ekstensifikasi.
4. Pemanfaatan data.
5. Efek Gaung.
6. Audit.
7. Penagihan (*Arrears Collection*).
8. Sumber daya manusia dan infrastruktur.
9. Konsolidasi Internal.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian komparatif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

Pengertian metode komparatif menurut Sugiyono (2011:11) yaitu: “Metode komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan”.

Penelitian studi kasus menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2010:26) adalah: “Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu”.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:38).

Sesuai dengan penelitian yang penulis pilih yaitu “Analisis Penerimaan PPh Sebelum Dan Sesudah Penerapan Metode *E-Billing*”, maka terdapat dua variabel independen.

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,2017:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerimaan PPh sebelum

penerapan metode *e-billing* sebagai variabel X_1 dan penerimaan PPh sesudah penerapan *e-billing* sebagai variabel X_2 .

Berdasarkan definisi konseptual variabel diatas, dapat ditetapkan indikator dan skala pengukuran sebagaimana diperlihatkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Skala
Penerimaan PPh sebelum penerapan metode <i>e-billing</i> (X_1)	Penerimaan PPh yang bersumber dari pembayaran PPh secara manual menggunakan SSP. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -38/PJ/2009).	Besarnya peningkatan/penurunan penerimaan PPh sebelum penerapan metode <i>e-billing</i> .	Rupiah	Rasio
Penerimaan PPh sesudah penerapan metode <i>e-billing</i> (X_2)	Penerimaan PPh yang bersumber dari pembayaran PPh menggunakan <i>e-</i>	Besarnya peningkatan/penurunan penerimaan PPh sesudah penerapan metode <i>e-billing</i> .	Rupiah	Rasio

	<i>billing. E-Billing</i> adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode <i>billing</i> (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014).			
--	--	--	--	--

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data penelitian yang diperoleh secara peninjauan langsung terhadap suatu objek penelitian dan hasil wawancara dengan pihak badan, dinas, dan kantor terkait, juga diperoleh dari hasil pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, jurnal-jurnal yang berhubungan dan lain-lain.

3.2.3.2 Periode Data yang Diteliti

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Data *time series* yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada suatu objek, dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Data

yang diteliti adalah penerimaan PPh KPP Pratama Tasikmalaya periode 2014 sampai dengan 2017 (4 tahun). Data peningkatan/penurunan penerimaan PPh tahun 2014 dan tahun 2015 merupakan data mengenai penerimaan PPh sebelum penerapan metode *e-billing*, maka diperoleh $n_1 = 2$ tahun. Sementara data peningkatan/penurunan penerimaan PPh tahun 2016 dan tahun 2017 merupakan data mengenai penerimaan PPh sesudah penerapan metode *e-billing*, maka diperoleh $n_2 = 2$ tahun.

3.2.3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data berupa:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung guna memperoleh data primer yang diperlukan dalam kaitannya dengan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan pihak yang memberikan informasi. Dengan cara

ini diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta penjelasannya secara langsung.

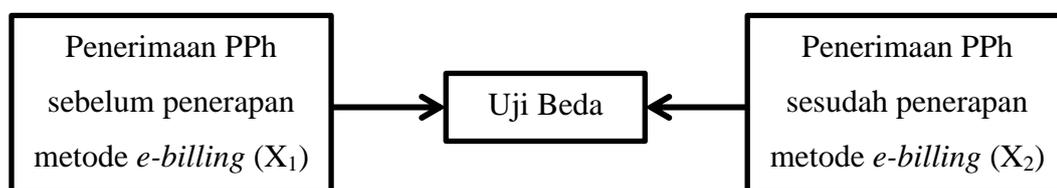
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan mengamati formulir serta laporan yang terdapat di KPP Pratama Tasikmalaya.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur atau sumber-sumber bacaan lainnya yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini digunakan sebagai pembandingan yang akan mendukung dalam pembahasan hasil penelitian, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang logis dari hasil penelitian pada dinas yang bersangkutan.

3.3 Paradigma Penelitian

Bertitik tolak dari judul penelitian yaitu “Analisis Penerimaan PPh Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *E-Billing*”, maka paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Paradigma Penelitian

Keterangan :

X₁ : Penerimaan PPh sebelum penerapan metode *e-billing*.

X₂ : Penerimaan PPh sesudah penerapan metode *e-billing*.

3.4 Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Tasikmalaya akan dianalisis agar dapat memecahkan dan membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Sebelum melakukan pengujian lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak menggunakan analisis trend. Uji ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi dari peningkatan jumlah Wajib Pajak apakah dapat menimbulkan bias atau tidak terhadap penggunaan indikator dalam penelitian. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% ($\alpha = 0,05$), apabila hasil pengujian tidak signifikan maka penggunaan indikator peningkatan/penurunan PPh per tahun dapat digunakan, apabila hasil pengujian signifikan maka akan dilakukan pemilihan sampel Wajib Pajak tertentu sebagai pengukuran penggunaan indikator penerimaan PPh dalam penelitian. Setelah itu barulah dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji *wilcoxon sign rank test*.

Uji *wilcoxon sign rank test* adalah uji non parametrik yang digunakan jika besaran arah perbedaan relevan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang sesungguhnya antara pasangan data yang diambil dari satu atau dua sampel yang saling berkaitan. Uji *wilcoxon sign test* berfungsi untuk menguji perbedaan antar data berpasangan, menguji komparasi antar 2 pengamatan sebelum dan sesudah, dan mengetahui efektivitas suatu perlakuan. Metode ini tidak tergantung pada bentuk distribusi induk maupun parameternya.

Langkah-langkah pengujian hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis

Apabila $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPh sebelum dan sesudah penerapan metode *e-billing*.

Apabila $H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPh sebelum dan sesudah penerapan metode *e-billing*.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% ($\alpha = 0,05$).

c. Kriteria pengambilan keputusan

H_0 diterima jika $p\text{-value} > 0,05$

H_0 ditolak jika $p\text{-value} < 0,05$

d. Melakukan pengujian

$$Z = \frac{T - \left[\frac{1}{4N(N+1)} \right]}{\sqrt{\frac{1}{24N(N+1)(2N+1)}}$$

Keterangan:

N = Banyak data yang berubah setelah diberi perlakuan yang berbeda.

T = Jumlah ranking positif atau ranking negatif terkecil

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, pengujian uji *wilcoxon sign rank test* dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SPSS versi 23.

e. Penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, penulis akan menganalisa kemudian menarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.